

Mengawal Proses Pengarusutamaan Pembangunan Rendah Emisi di Indonesia



Implikasi

- Adanya kebutuhan untuk kebijakan lokal untuk perencanaan, implementasi, dan monitoring & evaluasi penurunan emisi gas rumah kaca di tingkat Kabupaten
- Perlunya proses penyadartahuan dan peningkatan kesadaran yang terus menerus mengenai permasalahan mitigasi perubahan iklim
- Perlu adanya pengakuan yang diberikan oleh Para pelaku pembangunan di tingkat Nasional dan Provinsi kepada insiatif pembangunan rendah emisi yang dilakukan oleh Pokja di level kabupaten untuk mengakomodir proses bottom up dan top bottom
- Dibutuhkan proses penguatan kapasitas perangkat pemerintah daerah kabupaten sekaligus para pihak terkait untuk secara partisipatif merencanakan penggunaan lahan secara berkelanjutan untuk mendukung proses perencanaan pembangunan rendah emisi
- Pengelolaan data secara terpadu dapat menjadi dasar informasi untuk pengambilan keputusan dalam suatu proses pembangunan daerah yang berkelanjutan
- Pokja yang telah di bentuk di 12 kabupaten kabupaten dapat menjadi model untuk implementasi aksi mitigasi lokal yang tepat di Indonesia dan negara tropis lainnya
- Pendekatan berjenjang dianggap dapat menjadi kunci keberhasilan untuk melaksanakan pembangunan rendah emisi berbasis lahan karena mempertimbangkan proses sinergitas, sinkronisasi program pembangunan dengan pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan baik secara vertical maupun horizontal

Temuan

- Penyusunan perencanaan aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca saat ini terbatas di level nasional dan provinsi
- Kapasitas teknis dan kelembagaan perangkat pemerintahan yang masih terbatas di tingkat kabupaten menjadi kendala pelaksanaan perencanaan penggunaan lahan berkelanjutan sebagai langkah awal perencanaan pembangunan rendah emisi
- Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan rendah emisi di tingkat kabupaten memungkinkan proses pendekatan partisipatif dalam perencanaan penggunaan lahan sebagai proses penting untuk meningkatkan rasa kepemilikan untuk pelaksanaan perencanaan penggunaan lahan serta proses monitoring dan evaluasi
- Metode perencanaan tata guna lahan yang berkelanjutan di sektor berbasis lahan meningkatkan kemungkinan negosiasi multi-stakeholder dalam merencanakan penggunaan lahan yang inklusif dan integratif berbasiskan data serta informasi yang shahih. Meningkatnya akses terhadap informasi, koordinasi multi-pihak dan kesadaran terhadap pentingnya sinergi berjenjang menjadi faktor kunci keberhasilan perencanaan penggunaan lahan yang berkelanjutan menuju perencanaan pembangunan yang rendah emisi

Pengantar

Pemerintah Indonesia sejak awal telah berupaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, hal ini diperkuat dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di Indonesia dan berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca secara global. Target awal di penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan upaya sendiri dan tambahan 14% dengan dukungan internasional pada tahun 2020 yang diperkuat dengan target baru hasil COP 21 Paris adalah sebesar 29% pada tahun 2030.

Komitmen ini kemudian didukung dengan terbitnya Kebijakan Nasional Pemerintah dalam Rencana Aksi Nasional penurunan emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) yang diperkuat pada tahun 2015 dengan mengarusutamakan rencana aksi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. RAN-GRK ini kemudian diterjemahkan oleh pemerintah provinsi ke dalam rencana provinsi sebagai Rencana Aksi Daerah penurunan emisi gas rumah kaca (RAD - GRK).

Di Indonesia lebih dari 80% dari unilateral ukuran pengurangan emisi yang ditargetkan akan datang dari sektor berbasis lahan, yaitu, pertanian, kehutanan, penggunaan lahan dan perubahan penggunaan lahan, termasuk lahan gambut dan kebakaran hutan. Perencanaan dan implementasi emisi sektor berbasis lahan yang untuk sebagian besar tentang tanah dan tata kelola hutan masalah, termasuk tumpang tindih dengan proses pembangunan di daerah pedesaan dan hutan. Di tingkat lokal di mana pelaksanaan berlangsung, persimpangan penggunaan lahan, mitigasi dan perencanaan pembangunan sangat besar dan sering harus ditangani dengan cara integratif, sebagai pendekatan bentang lahan.

Pada tingkat daerah, perencanaan penggunaan lahan menjadi penting dalam mensinergikan agenda lokal, nasional dan global. Hal ini mendorong pentingnya proses, negosiasi dalam perencanaan penggunaan lahan yang inklusi, terintegrasi dan transparan (dewi et al 2011, van Noorwidjk et al 2013)

POKJA: Landasan Utama dalam Proses Penguatan Kapasitas Para Pelaku Pembangunan Sektor Berbasis Lahan

Salah satu faktor kunci kesuksesan untuk mempromosikan Pembangunan Rendah Emisi yang menekankan pada proses identifikasi aksi mitigasi lokal adalah perlunya kesiapan secara kelembagaan untuk mendukung dan mengawal proses tersebut. Proses ini, idealnya membutuhkan partisipasi seluruh pihak yang terlibat dalam merumuskan

bersama perencanaan menggunakan lahan untuk mengintegrasikan inisiatif pembangunan rendah emisi kedalam proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan, sekaligus monitoring dan evaluasi.

Untuk tujuan itulah maka di perlukan lembaga yang mampu untuk mengkoordinasikan seluruh pihak dan memfasilitasi proses penyusunan perencanaan aksi mitigasi lokal secara partisipatif. Pembentukan Pokja didalam proses perencanaan penggunaan lahan di anggap penting karena mendorong dialog antara pemangku kepentingan. Perpaduan pengetahuan yang memadai tentang penggunaan lahan dan inisiatif perencanaan dan pembangunan rendah emisi akan meminimalisasi unsur ketidakpercayaan dan konflik yang mungkin terjadi antara pemerintah dan masyarakat.

Proses pembentukan kelompok kerja yang akan merumuskan strategi pembangunan rendah emisi dengan mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat sangat penting sebagai suatu strategi untuk selanjutnya mendapatkan unsur efektivitas, kredibilitas, dan legitimasi. Secara Umum terdapat 10 langkah yang harus dilakukan dalam rangka pembentukan Pokja seperti yang dijelaskan pada gambar

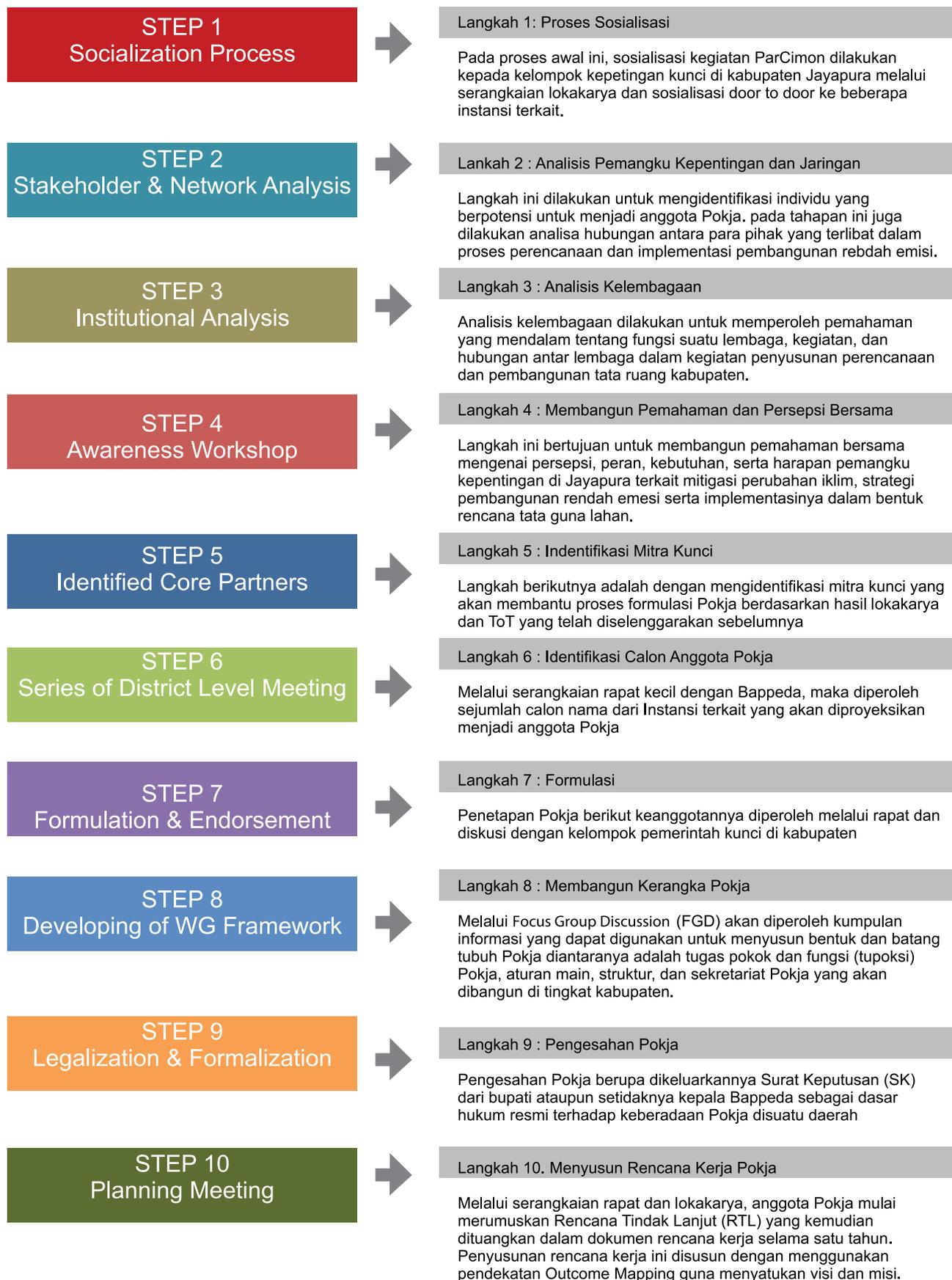
Tujuan pembentukan Pokja adalah untuk merumuskan kebijakan perencanaan penggunaan lahan di tingkat lokal dan untuk memfasilitasi multipihak serta kemitraan yang mendukung implementasi kegiatan aksi mitigasi lokal melalui strategi pembangunan rendah emisi sekaligus meningkatkan kondisi ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat.

Di bawah proyek ParCiMon, LAMA-I, GE LAMA-I proyek yang didukung oleh Uni Eropa dan Kedutaan Besar Denmark dan BMU Jerman, Mitra Pelaksana proyek yang terdiri dari World Agroforestry Center (ICRAF), GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit); CCROM (Centre for Climate Risk and Opportunity Management in Southeast Asia and The Pacific- IPB); Universitas Brawijaya dan mitra lokal yaitu Yayasan Lingkungan Hidup Papua (YALI-Papua) telah berhasil membentuk Pokja di 12 kabupaten yang tersebar di empat provinsi di Indonesia; Papua, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Jawa Tengah.

Pokja ini kemudian menjadi forum multi-pihak terkait pembangunan sektor berbasis lahan yang dapat menjadi "kendaraan" untuk memastikan pelaksanaan proses perencanaan penggunaan lahan berkelanjutan di tingkat kabupaten. Melalui berbagai proses penguatan kapasitas, Pokja mampu menyusun perencanaan kegiatan utama pembangunan rendah emisi di tingkat kabupaten melalui adopsi strategi penurunan emisi gas di tingkat provinsi

Melalui keberadaan Pokja yang pembentukannya melalui legitimasi hukum berupa SK Bupati, telah melakukan berbagai upaya agar aksi mitigasi yang telah di identikasi untuk di integrasikan ke dalam

perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dalam proses pengarusutamaan pembangunan rendah emisi di tingkat lokal, sekaligus mensinergikan antara mitigasi dan langkah adaptasi perubahan iklim.



Gambar 1. 10 langkah proses pembentukan Pokja

LUMENS: Memberdayakan pemangku kepentingan untuk perencanaan penggunaan lahan yang berkelanjutan

LUMENS merupakan sebuah kerangka kerja dan alat bantu perencanaan penggunaan lahan yang inklusif dan integratif berbasis data serta informasi yang shahih. LUMENS dapat mendukung para pemangku kebijakan dalam membangun unit perencanaan penggunaan lahan yang baik melalui kuantifikasi jasa lingkungan, analisa proses *trade-off* (tarik ulur) antara pendapatan masyarakat, perekonomian daerah dan keberlanjutan berbagai jasa lingkungan serta simulasi skenario perubahan penggunaan lahan berdasarkan faktor pemicu yang sesuai dengan konteks lokal (Gambar 2).

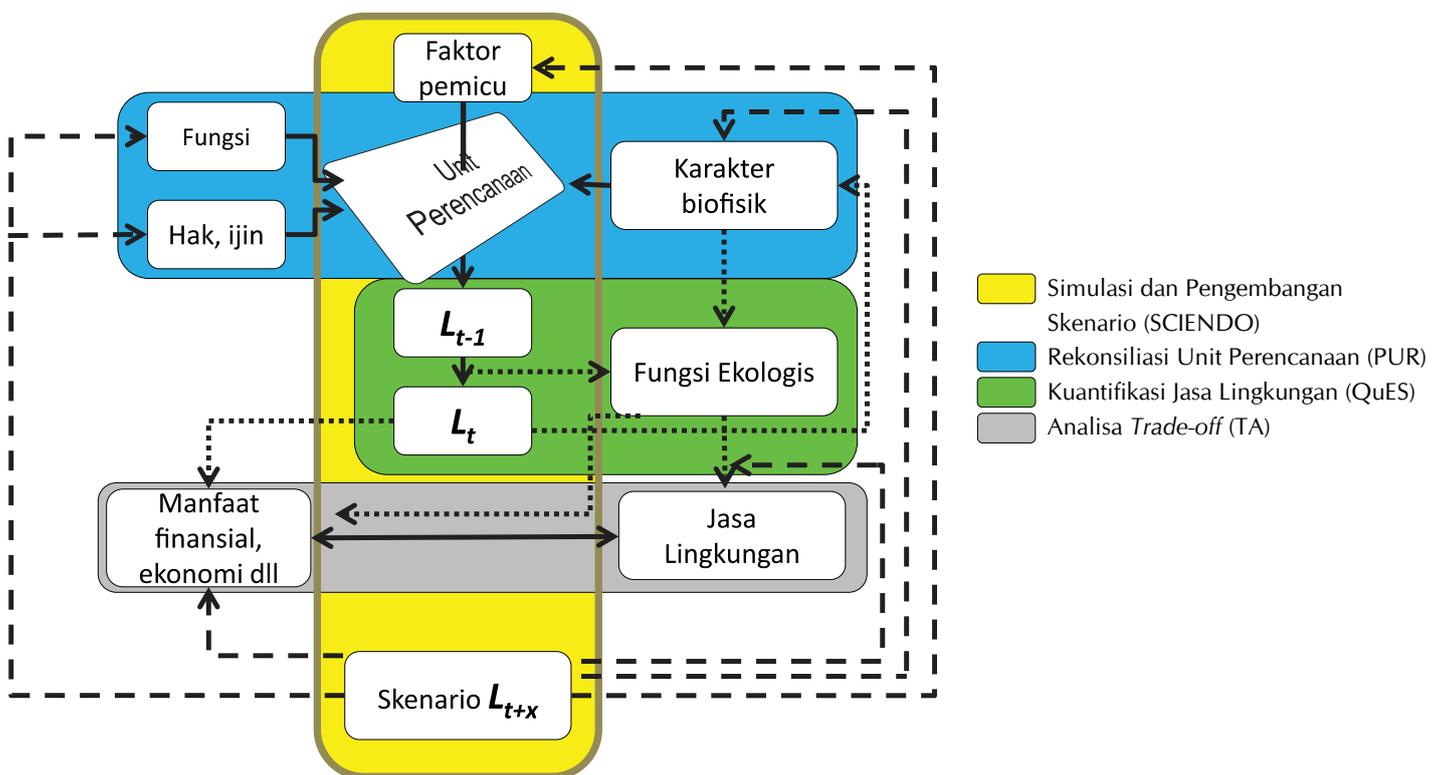
Perencanaan penggunaan lahan tidak hanya penting dalam menyusun sebuah rencana yang dapat dilaksanakan sebagai sebuah output; namun meningkatnya peluang keberhasilan yang diperoleh melalui proses perencanaan, pengumpulan dan negosiasi merupakan elemen tidak kalah pentingnya.

Tersedianya metode perencanaan tata guna lahan untuk berbagai jasa lingkungan dalam penyusunan strategi perencanaan pembangunan rendah emisi di Indonesia ini memungkinkan terjadinya negosiasi multi-stakeholder dalam perencanaan tata guna lahan yang berkelanjutan yang sekaligus mendukung peningkatan penghidupan masyarakat dengan menjaga dan memulihkan jasa lingkungan.

Metode yang telah di kembangkan oleh World Agroforestry Center ini telah mendukung terselenggaranya kegiatan penguatan kapasitas teknis bagi pemerintah daerah di 12 Kabupaten yang melibatkan lebih dari 300 peserta yang tergabung dalam Pokja pembangunan rendah emisi. LUMENS juga telah dimandatkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk digunakan sebagai metodologi dalam penyusunan RAD-GRK pada sektor berbasis lahan, sekaligus proses revisi RAD-GRK pada tahun 2015.

Selain LUMENS, melalui tiga proyek besar ini di kembangkan suatu alat bantu penilaian dan pemantauan kapasitas pemangku kepentingan untuk perencanaan pembangunan rendah emisi. Alat bantu ini didesain untuk menilai, mengukur, dan membuat rencana penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam membangun perencanaan pembangunan rendah emisi. Penilaian terhadap kapasitas pemerintah daerah digunakan untuk menentukan bentuk intervensi/ aktivitas penguatan kapasitas yang perlu dilakukan. Alat bantu ini juga dapat berfungsi untuk memantau perubahan kapasitas setelah intervensi dilakukan.

Melalui kegiatan penguatan kapasitas baik secara teknis maupun kelembagaan melalui pelaksanaan tiga proyek besar dengan pengelolaan proyek oleh ICRAF, telah mendukung proses teridentifikasinya 64 aksi mitigasi yang dihasilkan oleh Pokja di 6 kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan dan Papua untuk sektor berbasis lahan.



Gambar 2 Proses dan elemen LUMENS

Sinergi Berjenjang: Kunci Keberhasilan Proses Pengarusutamaan Pembangunan Rendah Emisi

Sinergi berjenjang perencanaan pembangunan rendah emisi (nested approach for low-emission development) adalah suatu sinergi antara rumusan aksi mitigasi di tingkat kabupaten dengan dokumen aksi mitigasi pada level provinsi dan nasional. Proses sinergi berjenjang ini dilakukan sebagai bagian upaya pengarusutamaan pembangunan rendah emisi kedalam rencana pembangunan daerah.

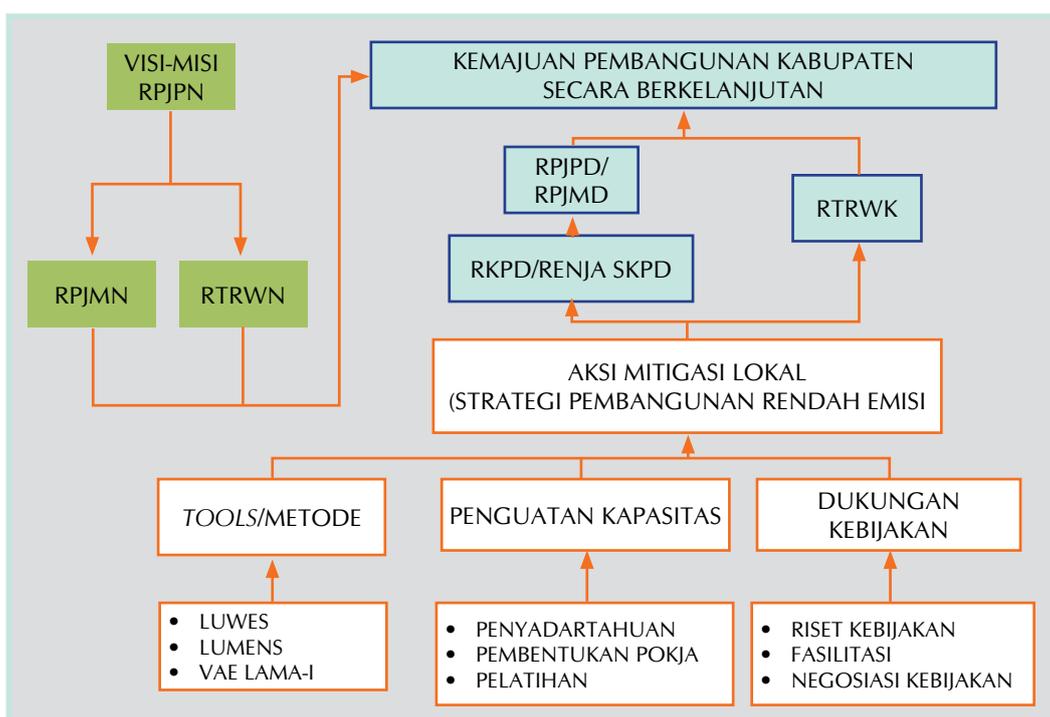
ICRAF bersama mitra pelaksana tiga proyek telah melakukan proses fasilitasi dialog antara pihak kabupaten dengan pihak pemegang kebijakan di tingkat provinsi. Langkah awal sinergi berjenjang diselenggarakan dalam bentuk konsultasi publik rencana aksi mitigasi yang telah diidentifikasi oleh Pokja. Enam konsultasi publik telah berhasil digelar di kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan, dan di kabupaten Jayawijaya, Jayapura dan Merauke di Provinsi Papua. Konsultasi publik tersebut menghasilkan beragam masukan dari para pemangku kepentingan ditingkat kabupaten sekaligus meningkatkan potensi implementasi rencana aksi mitigasi lokal.

Tujuan dari penyusunan strategi pembangunan rendah emisi adalah untuk memandu proses perencanaan pembangunan untuk meningkatkan keseimbangan ekonomi, sosial dan lingkungan. Proses Tagging (penyelarasan) aksi mitigasi dengan perencanaan pembangunan daerah kemudian selanjutnya dilakukan

untuk menyelaraskan aksi mitigasi yang telah disusun dengan perencanaan pembangunan daerah melalui konsultasi publik baik di tingkat kabupaten maupun di Provinsi. Pembangunan daerah di tuangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Rencana menjamin legalitas dari tahap implementasi bahkan untuk proses penganggaran di susun untuk dapat mengawal rencana pembangunan rendah emisi menuju proses implementasi (gambar 3).

Selain itu untuk menganalisa tingkat prioritas dan resiko terjadinya emisi gas rumah kaca di tingkat desa ataupun unit perencanaan. Alat bantu ini mampu memberikan analisa senjang (gap analysis) antara target rencana aksi mitigasi yang telah disusun dengan perencanaan pembangunan yang telah ada.

Pendekatan berjenjang dilanjutkan dengan proses dialog kebijakan untuk memfasilitasi dialog antara pihak kabupaten dengan pihak pemegang kebijakan di tingkat provinsi. Dialog ini dilakukan dalam bentuk lokakarya provinsi dan telah diselenggarakan di dua Provinsi yaitu Provinsi Papua yang di dihadiri oleh perwakilan dari 22 kabupaten dari total 29 Kabupaten yang di undang, Sementara lokakarya provinsi di Sumatera Selatan di hadiri oleh perwakilan dari 17 Kabupaten. Hasil dari lokakarya provinsi ini adalah adanya upaya sinkronisasi rencana aksi mitigasi lokal dengan dokumen aksi mitigasi RAD-GRK di tingkat provinsi. Selain itu menghasilkan panduan bagi pemerintah kabupaten dan provinsi untuk meningkatkan fungsi koordinasi dan melakukan upaya yang terintegrasi.



Gambar 3 Proses Pengarusutamaan Rencana Aksi Mitigasi ke dalam Rencana Pembangunan Daerah

Puncak dari kegiatan sinergi berjenjang ini adalah penyelenggaraan Seminar Nasional yang dilakukan untuk menciptakan forum untuk berdialog para pelaku pembangunan dalam upaya mempercepat implementasi aksi-aksi pembangunan rendah emisi berbasis lahan.

Kesimpulan

Pembangunan rendah emisi pada akhirnya harus menjadi pekerjaan bersama bangsa Indonesia. Penglibatan publik sebagai pemangku kepentingan utama dalam pengarusutamaan isu lingkungan dalam kebijakan pembangunan perlu dilakukan sedini mungkin. Langkah ini dapat dimulai dengan melakukan sinergi berjenjang serta melibatkan

partisipasi aktif masyarakat dalam monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan rendah emisi.

Kegiatan penurunan emisi harus dilaksanakan secara bersama dan tidak bisa berjalan sendiri sebab banyak faktor yang mempengaruhi, maka untuk mencapai target penurunan emisi, setiap daerah harus menyusun perencanaan pembangunan rendah emisi yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah.

Mengarusutamakan pembangunan rendah emisi ke dalam kerangka pembangunan berkelanjutan ini memerlukan ketahanan dari para pelaku pembangunan, proses penyadartahuan secara terus menerus merupakan konsekuensi yang harus dihadapi dalam mewujudkan pembangunan hijau di Indonesia.

▶ Locally Appropriate Mitigation Actions in Indonesia (LAMA-I) dilaksanakan oleh **World Agroforestry Centre (ICRAF)** bekerja sama dengan **Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)** dan **the Centre for Climate Risk and Opportunity Management in Southeast Asia and the Pacific (CCROM)** dengan dukungan dari the Danish International Development Agency (DANIDA). Lokasi program LAMA-I berlangsung di dua provinsi yaitu Sumatera Selatan dan Papua. Di Sumatera Selatan dilaksanakan di tiga kabupaten yaitu Musi Rawas, Musi Banyuasin, dan Banyuasin dan tiga kabupaten di Papua yaitu Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. www.worldagroforestry.org/lama-i

▶ Participatory monitoring by civil society of land-use planning for low-emissions development strategies (ParCiMon) didesain guna mendukung Papua mencapai pembangunan rendah emisi sebagai wujud kontribusi Papua dalam mensukseskan strategi mitigasi perubahan iklim nasional. Proyek ini menitikberatkan pada program pembangunan kapasitas masyarakat sipil pada proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan rendah emisi berbasis lahan. Proyek ParCiMon di Papua dilaksanakan selama 4 tahun (Januari 2013 - Desember 2016) dilaksanakan oleh konsorsium mitra antara World Agroforestry Centre (ICRAF) dengan Satuan Tugas untuk Pembangunan Rendah Emisi di Papua (PLCD-TF), Yayasan Lingkungan Hidup Irian Jaya (YALI Papua) dan Fakultas Pertanian, Universitas Program Locally Appropriate Mitigation Actions in Indonesia (LAMA-I) dilaksanakan oleh World Agroforestry Centre (ICRAF) bekerja sama dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dan the Centre for Climate Risk and Opportunity Management in Southeast Asia and the Pacific (CCROM) dengan dukungan dari the Danish International Development Agency (DANIDA). Lokasi program LAMA-I berlangsung di dua provinsi yaitu Sumatera Selatan dan Papua. Di Sumatera Selatan dilaksanakan di tiga kabupaten yaitu Musi Rawas, Musi Banyuasin, dan Banyuasin dan tiga kabupaten di Papua yaitu Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. www.worldagroforestry.org/lama-i

▶ Green Economy and Locally Appropriate Mitigation Actions in Indonesia (GE-LAMA-I) merupakan proyek yang didanai oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Konservasi Alam dan Keamanan Bangunan dan Nuklir Pemerintah Jerman (BMUB), dan diimplementasikan oleh GIZ Indonesia, bersama dengan Direktorat Lingkungan Hidup, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk mendukung pemerintah daerah serta para stakeholdernya dalam mengembangkan skenario pengelolaan sektor berbasis lahan yang efisien melalui proses inklusif dan metode analisa yang kredibel dan teruji. Di 6 (enam) GE-LAMA-I dilaksanakan di enam kabupaten di dua provinsi. Berau, Kutai Timur dan Paser di provinsi Kalimantan Timur serta Banjarnegara, Purbalingga dan Banyumas di Jawa Tengah 2016 dilaksanakan oleh konsorsium mitra antara World Agroforestry Centre (ICRAF) dengan Satuan Tugas untuk Pembangunan Rendah Emisi di Papua (PLCD-TF), Yayasan Lingkungan Hidup Irian Jaya (YALI Papua) dan Fakultas Pertanian, Universitas Program Locally Appropriate Mitigation Actions in Indonesia (LAMA-I) dilaksanakan oleh World Agroforestry Centre (ICRAF) bekerja sama dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dan the Centre for Climate Risk and Opportunity Management in Southeast Asia and the Pacific (CCROM) dengan dukungan dari the Danish International Development Agency (DANIDA). Lokasi program LAMA-I berlangsung di dua provinsi yaitu Sumatera Selatan dan Papua. Di Sumatera Selatan dilaksanakan di tiga kabupaten yaitu Musi Rawas, Musi Banyuasin, dan Banyuasin dan tiga kabupaten di Papua yaitu Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. www.worldagroforestry.org/lama-i

Sitasi

Agustina YD, Pasha R, Ekadinata A, Johana F. 2016. *Mengawal Proses Pengarusutamaan Pembangunan Rendah Emisi di Indonesia*. Brief 64. Bogor, Indonesia. World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Program.

Untuk informasi lebih lengkap silakan hubungi:
Andree Ekadinata (a.ekadinata@cgiar.org)

World Agroforestry Centre
ICRAF Southeast Asia Regional Program
Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor 16115
PO Box 161, Bogor 16001, Indonesia
Tel: +62 251 8625415; Fax: +62 251 8625416
www.worldagroforestry.org/regions/southeast_asia
blog.worldagroforestry.org

